



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARMAN SETIYAWAN
2. Jabatan : FUNGSIONAL AUDITOR
3. NHK : 717910

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 625.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m²/96 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 444 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, WARISAN Rp. 125.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m²/300 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, WARISAN Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 128.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, YAMAHA ZUPITER Z Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
4. LAINNYA, SEPEDA LIPAT ELEMENT ESCOSMO SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
5. LAINNYA, SEPEDA MTB UNITED RUBICK SEPEDA MTB Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
6. LAINNYA, SEPEDA LIPAT PACIFIC NORIS 2.1 NORIS 2.1 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 5.700.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 27.400.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	786.100.000
III. HUTANG	Rp.	3.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	783.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.